



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 188.45/Kep. 431-BagKum/2026
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 2026.
- KEDUA** : Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan usulan Perangkat Daerah dan untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Agenda penyampaian Program Pembentukan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT** : Dalam keadaan tertentu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Wali Kota meskipun tidak termasuk dalam agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota.

- KELIMA** : Kepada Perangkat Daerah pemrakarsa atau terkait langsung secara substansi dengan agenda Rencana Program Pembentukan Peraturan Wali Kota untuk segera mempersiapkan pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan memperhatikan tahapan/mechanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Februari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 188.45/Kep. 431-BagKum/2026
 TENTANG

PENETAPAN RENCANA PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2026

RENCANA PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026

NO. 1	TENTANG 2	STATUS 3		PERANGKAT DAERAH 4	TARGET PENYAMPAIAN 5	KET 6
		BARU	UBAH			
1.	Bangunan Gedung	✓		Disciptabintar	2026	
2.	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Data dan Informasi Geospasial Daerah.		✓	Disciptabintar	2026	
3.	Juknis Pemanfaatan Peta Dasar Kota Bandung Skala Besar.	✓		Disciptabintar	2026	
4.	Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kota Bandung	✓		Disciptabintar	2026	
5.	Pembina Jasa Konstruksi	✓		Disciptabintar	2026	
6.	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan	✓		DPMPTSP	2026	
7.	Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	✓		DPMPTSP	2026	
8.	Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Bandung	✓		BKAD	2026	

NO. 1	TENTANG 2	STATUS 3		PERANGKAT DAERAH 4	TARGET PENYAMPAIAN 5	KET 6
		BARU	UBAH			
9.	Analisis Standar Belanja	✓		BKAD	2026	
10.	Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah	✓		BKAD	2026	
11.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	✓		BKAD	2026	
12.	Penjabaran Perubahan APBD TA 2026	✓		BKAD	2026	
13.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah		✓	BKAD	2026	
14.	Tata Cara Pemungutan Retribusi Sewa Tanah dengan Peruntukan Rumah Tinggal	✓		BKAD	2026	
15.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	✓		BKAD	2026	
16.	Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.	✓		BPBD	2026	
17.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Saat Tanggap Darurat.	✓		BPBD	2026	

NO. 1	TENTANG 2	STATUS 3		PERANGKAT DAERAH 4	TARGET PENYAMPAIAN 5	KET 6
		BARU	UBAH			
18.	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengelola dan Pelestarian Cagar Budaya.	✓		Disbudpar	2026	
19.	Pembentukan dan Pemberdayaan Pusat Kreasi.	✓		Disbudpar	2026	
20.	Perluasan Kesempatan Kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif	✓		Disbudpar	2026	
21.	Fasilitasi dan Bantuan Akibat terjadinya Krisis Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.	✓		Disbudpar	2026	
22.	Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah	✓		Bapenda	2026	
23.	Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online	✓		Bapenda	2026	
24.	Pemberian Insentif dan Kemudahan Perpajakan Daerah	✓		Bapenda	2026	
25.	Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	✓		Bapenda	2026	
26.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung		✓	Bag.Org	2026	

NO. 1	TENTANG 2	STATUS 3		PERANGKAT DAERAH 4	TARGET PENYAMPAIAN 5	KET 6
		BARU	UBAH			
27.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas		✓	Bag.Org	2026	
28.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan.		✓	Bag.Org	2026	
29.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Sekretariat Daerah		✓	Bag.Org	2026	
30.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.	✓		Bag.Org	2026	
31.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung.	✓		Bag.Org	2026	
32.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.	✓		Bag.Org	2026	
33.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan.	✓		Bag.Org	2026	

NO. 1	TENTANG 2	STATUS 3		PERANGKAT DAERAH 4	TARGET PENYAMPAIAN 5	KET 6
		BARU	UBAH			
34.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.	✓		Bag.Org	2026	
35.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	✓		Bag.Org	2026	
36.	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung	✓		Bag.Org	2026	
37.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional.		✓	Bag.Org	2026	
38.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana		✓	Bag.Org	2026	
39.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung		✓	Bag.Org	2026	
40.	Survey Kepuasan Masyarakat	✓		Bag.Org	2026	

NO. 1	TENTANG 2	STATUS 3		PERANGKAT DAERAH 4	TARGET PENYAMPAIAN 5	KET 6
		BARU	UBAH			
41.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 677 Tahun 2016 tentang disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung		✓	Bag.Org	2026	
42.	Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni	✓		DPKP	2026	
43.	Tata Cara Pengesahan dan Pertelaan Rumah Susun	✓		DPKP	2026	
44.	Penyelenggaraan Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun	✓		DPKP	2026	
45.	Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	✓		DPKP	2026	
46.	Penataan Pedagang Kaki Lima	✓		DisKUKM	2026	
47.	Peraturan Internal Rumah Sakit RSUD Kota Bandung	✓		Dinkes	2026	
48.	Peraturan Internal Rumah Sakit RSKGM Kota Bandung	✓		Dinkes	2026	

NO. 1	TENTANG 2	STATUS 3		PERANGKAT DAERAH 4	TARGET PENYAMPAIAN 5	KET 6
		BARU	UBAH			
49.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung	✓		Dinkes	2026	
50.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung	✓		Dinkes	2026	
51.	Pengelolaan Piutang dan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung	✓		Dinkes	2026	
52.	Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung	✓		Dinkes	2026	
53.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 571 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung		✓	Dinkes	2026	
54.	Perencanaan dan Penganggaran BLUD Pada Rumah Sakit Daerah	✓		Dinkes	2026	
55.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung	✓		Dinkes	2026	
56.	<i>Bandung Corporate University</i>	✓		BKPSDM	2026	
57.	Satuan Tugas Anti Rentenir Kota Bandung	✓		DiskopUKM	2026	

NO. 1	TENTANG 2	STATUS 3		PERANGKAT DAERAH 4	TARGET PENYAMPAIAN 5	KET 6
		BARU	UBAH			
58.	Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	✓		Dinkes	2026	
59.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah		✓	Diskominfo	2026	
60.	Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2026-2029	✓		DP3A	2026	
61.	Standarisasi Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Ramah Anak di Kota Bandung	✓		DP3A	2026	
62.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD		✓	Setwan DPRD	2026	
63.	Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Pengruuan Tinggi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	✓		Disdik	2026	
64.	Sistem Penerimaan Murid Baru	✓		Disdik	2026	

NO. 1	TENTANG 2	STATUS 3		PERANGKAT DAERAH 4	TARGET PENYAMPAIAN 5	KET 6
		BARU	UBAH			
65.	Layanan Edukasi dan Terapi Unit Terpadu Asesmen serta Mediasi Psikologis di Satuan Pendidikan Kota Bandung Layanan Edukasi dan Terapi Unit Terpadu Asesmen serta Mediasi Psikologis di Satuan Pendidikan Kota Bandung	✓		Disdik	2026	
66.	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	✓		Disdik	2026	
67.	Bantuan Operasional Sekolah Daerah	✓		Disdik	2026	
68.	Pendidikan Muatan Lokal Holistik Intergratif	✓		Disdik	2026	
69.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekrusor Narkotika	✓		BKBP	2026	
70.	Tata cara Penanganan Konflik Sosial	✓		BKBP	2026	
71.	Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan pada UPTD Pengelolaan Sampah dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	✓		DLH	2026	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

